



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS V Tahun Sidang 2021-2022

(17 – 30 Mei 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

Handwritten signature and date: 6/6-22

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI III	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI IV	7
A. FUNGSI LEGISLASI	7
B. FUNGSI ANGGARAN	7
C. FUNGSI PENGAWASAN	7
KOMISI V	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13

KOMISI VI	14
A. FUNGSI LEGISLASI	14
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	14
KOMISI VII	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21
KOMISI VIII	23
A. FUNGSI LEGISLASI	23
B. FUNGSI ANGGARAN	23
C. FUNGSI PENGAWASAN	23
KOMISI IX	25
A. FUNGSI LEGISLASI	25
B. FUNGSI ANGGARAN	25
C. FUNGSI PENGAWASAN	25

KOMISI X	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	33
BADAN LEGISLASI	36
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	37
BADAN ANGGARAN	57
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	62
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	63

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kabupaten Sampang Madura	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan RDPU/Audiensi Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Sampang Madura, terkait menyampaikan aspirasi dari Forum Umat Islam Bersatu Madura, dll.	1. Komisi II DPR RI telah mendorong Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar menyiapkan Daerah yang tidak ada sinyal internet, untuk persiapan Sirekap, baik pada Pilpres, Pileg, maupun Pilkada 2024. 2. Terkait keluhan pada Perpres No 33, Komisi II DPR RI sudah menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				3. Terkait dengan aspirasi Forum Umat Islam Bersatu Madura, mengenai masalah penundaan pemilu 2024, maka sebenarnya sudah ada Surat Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Hari Pemilu, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.
2.	Pemerintah Daerah Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan.	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ke Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan.	Membahas penyelenggaraan pemerintahan desa.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan RUU tentang HAPER)	Rapat Dengar Pendapat Umum	Membahas: Masukan terkait dengan pelaksanaan hukum acara perdata bagi advokat. Beberapa masukan dari PERADI, diantaranya: 1. Perlu diatur beracara perdata secara elektronik, mulai <i>e-filing</i>, <i>e-payment</i>, <i>e-summon</i>, <i>e-tigation</i>, bahkan <i>e-execution</i> dengan syarat-syarat tertentu. Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019. 2. Perlu ada batasan perkara perdata yang bisa upaya hukum, sebagaimana dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Prosedur gugatan sederhana dan Perubahannya dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019. 3. Perlu mengakomodir beberapa Sema & Perma yang berkaitan hukum acara perdata, seperti pembuktian dan putusan serta merta.	1. RDPU dilaksanakan secara fisik dan Virtual, pada tanggal 25 Mei 2022 dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M. 2. RDPU dipimpin oleh Ketua Panja RUU ttg HAPER, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. RDPU dihadiri oleh Ketua Umum PERADI dan jajarannya.
2.	RUU tentang Perubahan Kedua	Rapat Dengar Pendapat	Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menteri Hukum dan	1. Rapat dilaksanakan secara fisik dan

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan RUU tentang Narkotika)		HAM RI dan Tim Pemerintah Pembahas RUU tentang Narkotika, membahas penjelasan Pemerintah atas substansi dalam RUU tentang Narkotika. Pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Hukum dan HAM memberikan penjelasan mengenai beberapa substansi yang diubah dalam RUU tentang Narkotika, antara lain: 1. Latar belakang pembentukan RUU tentang Narkotika, salah satunya yaitu karena belum adanya pengaturan mengenai zat psikoaktif baru (<i>new psychoactive substance/NPS</i>) yang marak beredar di masyarakat yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkotika. 2. Materi yang diatur dalam RUU tentang Narkotika, yaitu: a. Zat psikoaktif baru (<i>new psychoactive substance/NPS</i>) b. Rehabilitasi c. Tim Asesmen Terpadu d. Kewenangan penyidik e. Syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel serta penetapan status barang sitaan f. Penyempurnaan ketentuan pidana. 3. Rekapitulasi DIM sebanyak 360 DIM, terdiri atas: a. DIM Tetap sebanyak 66 DIM	virtual, pada tanggal 23 Mei 2022. 2. RDP dipimpin oleh Ketua Panja RUU ttg Narkotika, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. RDP dihadiri oleh Wakil Menkumham, dan Tim Pemerintah Pembahas RUU ttg Narkotika

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. DIM Redaksional sebanyak 13 DIM c. DIM yang harus dimintakan penjelasan sebanyak 10 DIM d. DIM Substansi sebanyak 178 DIM e. DIM Substansi Baru sebanyak 93 DIM 4. Pengaturan Narkotika dan Psikotropika dalam undang-undang tersendiri (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) 5. Dengan berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika beserta lampirannya masih berlaku kecuali Lampiran mengenai jenis psikotropika Golongan I dan Golongan II.	
3.	RKUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan	Rapat Dengar Pendapat	Membahas: 1. 14 (<i>empat belas</i>) Isu krusial RKUHP yang telah disosialisasi oleh Pemerintah kepada masyarakat. 2. Tindak lanjut pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan.	1. Rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual, pada tanggal 25 Mei 2022. 2. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond J Mahesa, S.H., M.H. 3. RDP dihadiri oleh Wakil Menkumham, dan jajarannya.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	---	---	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Mei 2022 dan Siklus Anggaran dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi III akan melakukan rapat fungsi anggaran dimulai pada tanggal 30 Mei s.d. 10 Juni 2022 membahas mengenai Pagu Indikatif TA 2023 Mitra Kerja.	---

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
1.	---	---	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Mei 2022, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 Komisi III akan fokus melaksanakan kegiatan fungsi anggaran dan fungsi legislatif, tetapi tidak menutup kemungkinan melakukan kegiatan fungsi pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan substansi yang akan dibahas dalam rapat dengan Komisi III.	---

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	ho	-	-	Proses harmonisasi di Baleg DPR RI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Pertanian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); dan b. Isu-isu Aktual.	a. Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan <i>biosecurity</i> dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antardaerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				b. Kementerian Pertanian wajib mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia. c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit. d. Kementerian Pertanian untuk menerbitkan rekomendasi impor terhadap semua komoditas pertanian maupun peternakan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, dalam upaya melindungi produksi pertanian dalam negeri.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	Dampak negatif penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa	a. FPHJ menyampaikan kekhawatiran atas rusaknya ekosistem hutan di Pulau Jawa akibat ditetapkan SK Menteri LHK Nomor 287/MENLHK/ PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Dalam hal ini FPHJ sudah menyampaikan gugatan atas diterbitkannya SK MenLHK Nomor 287 Tahun 2022, melalui permohonan uji material atas isi SK MenLHK Nomor 287 Tahun 2022 dimaksud. b. FPHJ tidak menolak Program Reforma Agraria, namun FPHJ menolak jika hutan yang dijadikan sebagai objek Reforma Agraria, karena masih banyak objek lahan lain yang lebih cocok seperti HGU yang terbengkalai, dan lainnya

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan a. Sekretaris Jenderal b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan d. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah.	a. Realisasi PNBPN sektor Kelautan Perikanan; b. Persiapan Stok Benih Ikan di UPT untuk Pokdakan; dan c. Ekspor dan Impor Komoditas Kelautan Perikanan.	1. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun 2021 sebesar Rp995,74 miliar dan per Mei 2022 telah mencapai Rp657,09 miliar dari target Rp1,9 triliun atau sebesar 34,56%. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kontrak kerja sama dan membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ke depan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan didorong untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan kesepakatan kerja sama (diplomasi) dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan. 3. Mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan (Pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya dengan dukungan pasokan benih ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir. 4. Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian terkait: a. Data-data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); b. Data Penangkapan Ikan terukur di WPP RI; c. Data inventarisasi aset beserta statusnya yang terbukti tidak operasional (mangkrak) terutama hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Data diserahkan selambat-lambatnya kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	Rapat Dengar Pendapat Umum	Mendengarkan masukan pakar akademisi terkait penyusunan Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	1. RDPU dilaksanakan secara fisik dan Virtual, pada tanggal 23 Mei 2022 dengan pakar akademisi dari UI, UNTAR dan ITB 2. RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. Ridwan Bae.
2.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	Rapat Dengar Pendapat Umum	Mendengarkan masukan narasumber bidang transportasi terkait penyusunan Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	1. RDPU dilaksanakan secara fisik dan Virtual, pada tanggal 24 Mei 2022 dengan para narasumber bidang transportasi dari ITDP, INSTRAN dan YLKI 2. RDPU dipimpin oleh Ketua Lasarus, S.Sos, M.Si dan Wakil Ketua H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M.S

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	---	---	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Mei 2022 dan Siklus Anggaran dari Badan Anggaran DPR RI, Komisi V akan melakukan rapat fungsi anggaran dimulai pada tanggal 30 Mei s.d. 10 Juni 2022 membahas RKA K/ dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2023	---

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	---	---	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Mei 2022, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 Komisi V akan melakukan kegiatan fungsi pengawasan sesuai dengan substansi dan kebutuhan yang dibahas dalam rapat Komisi V.	---

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Holding BUMN Farmasi	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI Panggil Dirut <i>Holding</i> BUMN Farmasi. Dalam rangka evaluasi kinerja dan RKAP Tahun Anggaran 2022, Komisi VI DPR RI memanggil Direktur Utama <i>Holding</i> BUMN Farmasi dan Anak Perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada hari Senin, 23 Mei 2022. Dalam RDP tersebut Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Bio Farma (Persero) <i>Holding</i> dan anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 dan RKAP Tahun Anggaran 2022. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) <i>Holding</i> dan anak Perusahaan untuk melakukan	RDP Komisi VI DPR RI dengan <i>Holding</i> BUMN Farmasi, Senin 23 Mei 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			beberapa hal, antara lain ; Terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai <i>channel</i> layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dalam kerangka teknologi 4.0., Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19 dan variannya. Melakukan penataan <i>strategic roadmap</i> dengan mengedepankan sinergisitas antar anak perusahaan BUMN farmasi dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara. Memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait dengan TKDN dalam industri farmasi dan Melakukan inovasi teknologi farmasi demi mencapai kemandirian bahan baku industri farmasi nasional. Komisi VI DPR RI juga meminta PT Bio Farma (Persero) <i>Holding</i> dan anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi bisnis model dan peningkatan investasi yang lebih berkesinambungan pada masa Pasca Covid-19 agar menjadi pemain industri farmasi yang kompetitif pada tingkatan nasional, regional maupun global.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Holding Semen Indonesia	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT Semen Indonesia (<i>Holding</i>) dan anak perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 pada hari Selasa, 24 Mei 2022. Selain menerima penjelasan dari PT Semen Indonesia (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021, Komisi VI DPR RI juga meminta Direksi untuk menyampaikan target-target secara kualitatif dan kuantitatif terkait pengembangan PT Semen Indonesia (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Komisi VI DPR RI juga meminta PT Semen Indonesia (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam capex dan opex, serta meminta PT Semen Indonesia (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi bisnis model yang lebih berkesinambungan agar mampu meningkatkan ekspor dan menjadi pemain industri semen nasional, regional maupun global. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga akan meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan	RDP Komisi VI DPR RI dengan PT Semen Indonesia <i>Holding</i> , Selasa 24 Mei 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pasokan batubara untuk industri semen BUMN dan meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Ivestasi dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan moratorium pembangunan pabrik semen baru.	
3.	Holding BUMN Perkebunan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI Terima Penjelasan PTPN III Terkait Kinerja Perusahaan Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PTPN III (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan terkait kinerja perusahaan pada Tahun 2021 dan perkembangan kinerja perusahaan pada tahun 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada hari Selasa, 24 Mei 2022. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Komisi VI DPR RI meminta PTPN III (Persero) <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan untuk melakukan beberapa hal, antara lain ; - o Terus berupaya melakukan transparansi perusahaan agar level Keterbukaan Informasi Publik dapat meningkat. - o Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.	RDP Komisi VI DPR RI dengan <i>Holding</i> BUMN Perkebunan, Selasa 24 Mei 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			- Terus meningkatkan sinergitas antar anak perusahaan PTP dalam rangka memperluas market share secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara. - Memperhatikan hak-hak karyawan perusahaan yang telah pensiun, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan penataan <i>strategic roadmap</i> yang fokus pada industri perkebunan dan produk turunannya. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana integrasi bisnis PTPN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara membentuk 3 (tiga) kelompok perusahaan, yaitu: PalmCo, SugarCo, dan SupportingCo, sebagaimana sejalan dengan target Pemerintah, yaitu: (1)Peningkatan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional; (2)Peningkatan kesejahteraan petani sawit dan tebu melalui peningkatan produktivitas; dan (3)Stabilitas harga dan ketersediaan stok minyak goreng serta gula konsumsi nasional.	
4.	Tim Kuasa Hukum Member	a. Pelaksanaan Undang-Undang;	Komisi VI DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum Member Robot <i>Trading</i> DNA PRO. Pada rapat yang dipimpin	RDPU Komisi VI DPR RI dengan Tim

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Robot Trading DNA PRO	b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak M. Sarmuji, Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari member robot <i>trading</i> DNA Pro yang saat ini telah dibekukan oleh Bappebti. Member tersebut menyampaikan aspirasi terkait bagaimana nasib pengembalian dana mereka, kurangnya sosialisasi terkait robot <i>trading</i> dan legalitas robot <i>trading</i> yang masih simpang siur. Seluruh aspirasi akan disampaikan oleh Komisi VI DPR RI apada rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, BAPPEBTI dan instansi/lembaga lainnya	Kuasa Hukum Member Robot <i>Trading</i> DNA PRO, Rabu 25 Mei 2022
5.	BAPPEBTI	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan BAPPEBTI terkait permasalahan perdagangan digital diantaranya aset Kripto dan Investasi Robot <i>Trading</i>. Pada rapat yang dipimpin oleh Bapak M.Sarmuji dan Bapak Martin Manurung selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI, seluruh anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat yang telah menjadi korban investasi robot <i>trading</i>. Di akhir rapat, Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI untuk meningkatkan fungsi pengawasan	RDP Komisi VI DPR RI dengan BAPPEBTI, Rabu 25 Mei 2022

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dengan membentuk pusat layanan pengaduan masyarakat baik secara onsite maupun online (call centre), mempercepat penyusunan regulasi terkait investasi robot <i>trading</i> serta terus melaporkan progres penyelesaian permasalahan hukum investasi robot <i>trading</i> yang saat ini sedang berjalan.	
6.	Holding BUMN Pertambangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) / MIND ID beserta seluruh anggota <i>holding</i> terkait pembahasan kinerja korporasi tahun 2021 dan RKAP tahun 2022. Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh Bapak M.Hekal serta Bapak Martin Manurung selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI serta dihadiri oleh jajaran direksi MIND ID beserta anak usaha antara lain PT Antam Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, serta PT Freeport Indonesia. Dalam RDP tersebut Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja korporasi tahun 2021 serta mendorong MIND ID group untuk terus berinovasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pengembangan yang berwawasan lingkungan.	RDP Komisi VI DPR RI dengan <i>Holding</i> BUMN Pertambangan, Rabu 25 Mei 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian b. Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk pembangunan <i>Industrial Integrated Center</i> b. Tata Kelola UPT BSKJI pasca Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN c. Lain-lain	
2.	a. Dirjen Minerba Kementerian ESDM b. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM c. Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power d. Dirut PT Gunungmas Mining	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penjelasan kejadian kebocoran sumur gas PT SMGP pada bulan April 2022; b. Penjelasan kejadian insiden longsor di wilayah kerja PT Sorikmas Mining c. Upaya penanggulangan dan pencegahannya; d. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	a. Dirjen Agro Kementerian Perindustrian b. Gabungan pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKINDO) c. Asosiasi Produsen CPO d. Asosiasi Produsen Minyak Goreng e. Ketum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) f. Ketum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (APKASINDO Perjuangan)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Penjelasan mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng	
7.	Dirjen Migas Kementerian ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Performan penerimaan Badan Usaha Sektor Hulu Migas pda Tahun 2022 dan target Tahun 2023 b. Progress <i>Lifting</i> Migas Tahun 2022 dan target Tahun 2023 c. Proyeksi ICP Tahun 2023 d. Lain-lain	
8.	Kepala SKK MIGAS	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Performan penerimaan Badan Usaha Sektor Hulu Migas pda Tahun 2022 dan target Tahun 2023 b. Progress <i>Lifting</i> Migas Tahun 2022 dan target Tahun 2023 c. Proyeksi ICP Tahun 2023 d. Lain-lain	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian DPR RI	Komisi VIII DPR RI membahas dan menyempurnakan konsep RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang akan dihamonisasi di Badan Legislasi DPR RI.	RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia akan diusulkan untuk masuk ke Prolegnas Prioritas Tahun 2022 menggantikan RUU tentang Penanggulangan Bencana
2.	RUU tentang Penanganan Yatim Piatu	Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian DPR RI	Komisi VIII DPR RI menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun konsep RUU tentang Penanganan Anak Yatim agar dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Komisi VIII DPR RI membentuk Panitia Kerja	Panitia Kerja atau Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Pengawasan Pendidikan Keagamaan dibentuk untuk mengetahui permasalahan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		tentang Pengawasan Pendidikan Keagamaan	yang mengakibatkan pendidikan keagamaan selalu tertinggal dibanding pendidikan umum, baik dari sisi tata kelola lembaga pendidikan, sumber daya manusia maupun anggaran. Se jauh ini anggaran untuk pendidikan keagamaan sangat kecil dibanding anggaran untuk pendidikan umum, yang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dialokasikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBN dan APBD.	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandung (Jabar), Medan (Sumatera Utara) dan Lombok (NTT)	Pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan ibadah haji dan program moderasi beragama.	1. Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sudah dilaksanakan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. 2. Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa program moderasi beragama yang digagas oleh Kemenag dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	Tidak ada kegiatan Panja	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan V TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 19 Mei 2022 Rapat Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS	Membahas program kerja Panja tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS	Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS mengkaji pihak-mana saja yang akan diundang dalam rapat Panja tersebut selain dengan kementerian/lembaga terkait.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB Rapat Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS dengan • Persatuan Dokter Puskesmas Indonesia; • Forum Bidan PTT se Indonesia; • Forum Tenaga Kesehatan Honorer; • Asosiasi Puskesmas se Indonesia; • Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI); • Asosiasi Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia (ARSADA).	1. Mendapatkan informasi mengenai data masing-masing jenis tenaga Kesehatan Indonesia, termasuk mengenai status kepegawaiannya; 2. Mendapatkan gambaran mengenai permasalahan tenaga kesehatan honorer yang selama ini terjadi.	• Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang diundang, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS dalam menyusun laporan akhir panja.	
3.	Tanggal 23 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB, Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI	1. Mendapatkan penjelasan kondisi terkini kasus Hepatitis akut dan langkah-langkah penanganannya; 2. Mendapatkan penjelasan tentang persiapan transisi pandemi menuju endemik	1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat sistem kesehatan nasional sebagai langkah mitigatif penanganan hepatitis akut melalui: a. peningkatan surveilans dan deteksi dini kasus dengan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		termasuk penanganan <i>emerging disease</i> ; dan 3. Mendapatkan penjelasan persiapan pelaksanaan vaksinasi di Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2022.	penguatan kapasitas laboratorium pemeriksaan; b. intensifikasi dan pemerataan distribusi pelaksanaan teknologi Whole Genome Sequencing (WGS) di fasilitas balai besar laboratorium kesehatan dan laboratorium kesehatan daerah dengan mempersiapkan SDM Kesehatan yang dibutuhkan; dan c. peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara masif ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan lembaga pendidikan, dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mempersiapkan kebijakan strategis transisi pandemi menuju endemi melalui: a. tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan di tengah beberapa relaksasi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mempersiapkan transisi menuju aktivitas normal; b. mempertahankan upaya pengendalian kasus COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya varian baru COVID-19, melalui upaya <i>testing</i> dan <i>tracing</i> sehingga dapat memprediksi potensi ancaman kesehatan ke depan; dan c. mempersiapkan regulasi penggunaan <i>self-testing</i> sebagai salah satu bentuk penguatan Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dalam pengendalian COVID-19. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak, dengan: a. memastikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2022 dapat mencapai target cakupan imunisasi, dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait,	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			khususnya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi; b. segera menyelesaikan petunjuk teknis vaksinasi untuk mengaktifasi program imunisasi tambahan dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), termasuk vaksinasi HPV; dan c. melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan program imunisasi di tahun sebelumnya agar dapat merancang mitigasi yang tepat untuk pelaksanaan program imunisasi selanjutnya.	
4.	Rabu s.d Jumat Tanggal 25 – 27 Mei 2022	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI tentang Embarkasi Haji ke : 1. Medan, Provinsi Sumatera Utara; 2. Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 3. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.	Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk : 1. Mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2022 oleh Pemerintah, mulai dari masa persiapan pemberangkatan,	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			selama di tanah suci serta kembali lagi ke tanah air; 2. Mendapatkan gambaran utuh terhadap penanganan kesehatan haji khususnya dalam penyediaan obat, vaksinasi, makanan, dan fasilitas pelayanan kesehatan Jemaah Haji, termasuk tenaga kesehatannya di embarkasi. 3. Mendapatkan gambaran penanganan Jemaah haji penderita penyakit kronis dan kondisi risiko tinggi.	
5.	Tanggal 30 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB Rapat Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS dengan: • Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI); • Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI); • Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);	1. Mendapatkan informasi mengenai data masing-masing jenis tenaga Kesehatan Indonesia, termasuk mengenai status kepegawaiannya; 2. Mendapatkan gambaran mengenai permasalahan tenaga kesehatan honorer yang selama ini terjadi.	• Komisi IX DPR RI menerima dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang diundang, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI tentang Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non PNS dalam menyusun laporan akhir panja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	• Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI); • Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI); • Pengurus Federasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB); dan • Pengurus Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Honorer dengan Penugasan Khusus.			
6.	Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan	1. Mendapatkan penjelasan terkait <i>platform Indonesia Health Service (HIS)</i> yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan; 2. Mendapatkan penjelasan terkait transformasi digital kesehatan melalui pengembangan <i>Citizen Health Application (CHA)</i>.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU tentang Praktik Psikologi	Rapat Intern Panja	Membahas persiapan rapat panja RUU tentang Praktik Psikologi dan menentukan lokasi melakukan uji publik.	
2		23-25 Mei 2022 Rapat Panja (Konsinyering)	Menyelesaikan penormaan RUU dan menyepakati mengubah judul RUU dari RUU Praktik Psikologi menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Telah menghasilkan draf RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dan siap dilakukan uji publik.
3		27-29 Mei 2022 Uji Publik ke UNS-Solo, UNHAS-Makasar, dan UNAIR- Surabaya.	Dalam uji publik, audiens dan para pemangku kepentingan bidang psikologi menyampaikan tanggapan dan usulan penyempurnaan, antara lain: 1. Perlu pengaturan mengenai psikolog sebagai ilmuwan, tidak hanya psikologi yang hanya akan berpraktek, sehingga perlu penguatan pengaturan terkait jenjang Pendidikan tingginya. 2. Mengusulkan agar ada sanksi pidana, dimana dalam draf saat ini hanya ada sanksi administrative. 3. Mengusulkan pengaturan STR dan SIP dibedakan dan dipertegas. 4. Terdapat beberapa redaksi dalam RUU yang masih perlu disempurnakan.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4	Revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata	30 Mei 2022 Rapat Komisi X DPR RI dengan BKD	Komisi X DPR ingin mendapatkan informasi perkembangan penyusunan NA dan Revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata	Anggota Komisi X DPR RI memberikan masukan untuk penyempurnaan RUU Revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
1	Kemenparekraf/Baparekraf RI	18 Mei 2022 RDPU dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI)	DPP HPI Menyampaikan aspirasi: a. Terdapat permasalahan mendasar dalam praktek jasa Pramuwisata/ Pemandu Wisata, yaitu: 1. Banyak terdapat Pramuwisata ilegal atau tidak memiliki lisensi, dan/atau hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi. 2. Pramuwisata bekerja tidak sesuai dengan kode etik, dan hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap. 3. Terdapat dikotomi profesi Pramuwisata sehingga menjadikan eksistensi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
			organisasi pramuwisata tidak memiliki legitimasi secara menyeluruh. b. Pramuwisata memerlukan regulasi tersendiri dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan, diantaranya perlunya revisi Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 82/PW.102/MPPT-88 Tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata, dan Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. c. DPP-HPI mengusulkan dan menyampaikan Naskah Akademik RUU Tentang Pramuwisata Indonesia untuk menjamin peran strategis Pramuwisata/Pemandu Wisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
2	Kemendikbudristek RI	18 Mei 2022 RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Doktor Indonesia (AMDI) tahun 2018	Mennyampaikan aspiran agar adanya kebijakan bantuan untuk biaya SPP sesuai UKT, bantuan biaya hidup, biaya penelitian dan biaya publikasi jurnal internasional.
		20-22 Mei 2022 Kunjungan kerja spesifik bidang Pendidikan ke Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, tentang kesiapan PTM pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah	Secara umum pemerintah Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh telah siap untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
3	Perpusnas RI	19 Mei 2022 RDP dengan Kepala Biro perencanaan dan Keuangan Perpusnas RI RDPU dengan: 1. Heri Hendrayana Harris (Gol A Gong), Duta Baca Indonesia 2. Donny Safari, Komunitas Hayu Maca Kota Cimahi 3. Aisyah, Komunitas Literasi Sajak Senja Indonesia 4. Rezky Amalia, Rumah Literasi Makassar 5. Muthi' Masfu'ah, Pegiat Literasi Kalimantan Timur 6. Yons Ahmad, Penulis Kota Depok 7. Syafrudin Pernyata, Gerakan Peningkatan Minat Baca Kalimantan Timur	▪ Perpusnas RI menyampaikan perkembangan literasi di Indonesia ▪ Komunitas literasi menyampaikan perkembangan dan permasalahan literasi di Indonesia. ▪ Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan, antara lain: 1. Mendorong Perpusnas RI untuk berkoordinasi dengan Kemendagri RI agar pemerintah daerah mendukung safari literasi yang dilakukan oleh Duta Baca Indonesia. 2. Mendorong Perpusnas RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI mendukung alokasi BOS agar dapat dibelanjakan untuk buku perpustakaan sekolah selain buku pelajaran, pengembangan perpustakaan sekolah dan komunitas literasi. 3. Mendorong Perpusnas RI berkoordinasi dengan PT. POS Indonesia untuk memudahkan distribusi bahan bacaan dengan membebaskan biaya pengiriman buku.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Legislasi	1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat baleb Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022. (tgl 23 Mei 2022, pukul 13.00 WIB).
		2. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). (tgl 25 Mei 2022, pukul 13.00 WIB).
		3. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) (30 Mei 2022, pukul 10.00 WIB).
		4. FGD terkait RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). (30 Mei 2022, Pukul 13.00 WIB).
		5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. (30 Mei 2022, pukul 16.00 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) & Anggota GKSB DPR RI Uni Eropa Sjarifuddin Hasan (F-PD)	Wakil Ketua BKSAP DPR RI & Anggota Grup Kerja Sama Bilateral Uni Eropa, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) menghadiri acara resepsi <i>Europe Day</i> yang diadakan di <i>Ballroom Ayana Mid Plaza</i> (09/05/2022). Acara tersebut merayakan perdamaian dan persatuan di Eropa juga bertepatan dengan Deklarasi Schuman (09/05/1964) yang menjadi dasar terbentuknya Uni Eropa. Diharapkan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa menjadi semakin erat serta berbagai potensi kerja sama termasuk hubungan antar-parlemen dapat terus ditingkatkan. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR RI & Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa Sjarifuddin Hasan (F-PD), Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Perhubungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menkominfo, dan Walikota Bogor.	Tgl. 9 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	KSB BKSAP	Set. KSB mengikuti Rapat Persiapan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-3 Indonesia – Pakistan	Dalam rapat tersebut, Set. KSB BKSAP menyampaikan <i>update</i> terbaru Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia – Pakistan serta <i>update</i> terkait MoU antara DPR RI dan Parlemen Pakistan.	Tgl. 12 Mei 2022
3.	KSI BKSAP	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengikuti rapat satgas IPU ke-II untuk Konflik Rusia - Ukraina	Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon kembali mengikuti rapat Satgas IPU Ke-II untuk Konflik Rusia-Ukraina secara daring pada Selasa, 12 Mei 2022. Mengawali sesi pertemuan, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong menyampaikan perkembangan terkini terkait korespondensi Satgas dengan parlemen Rusia dan Ukraina. Parlemen Rusia telah persetujuan atas kehadiran Satgas IPU yang disampaikan melalui surat resmi ke Presiden IPU. Saat ini, Satgas masih menunggu konfirmasi dari pihak Parlemen Ukraina. Seiring dengan informasi tersebut, Ketua BKSAP menegaskan bahwa Satgas harus segera mengambil langkah-langkah konkret menuju negosiasi. "Karena Parlemen Rusia sudah mengindikasikan persetujuan terhadap kehadiran Satgas IPU, maka kita harus segera melakukan langkah demi langkah menuju negosiasi sambil menunggu	Tgl. 12 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			jawaban resmi dari pihak Ukraina", imbuhnya. Fadli Zon juga mengingatkan seluruh anggota Satgas terkait netralitas Satgas IPU yang perlu terus digaungkan kepada kedua belah pihak. Selain itu, negosiasi harus segera dilakukan untuk de-eskalasi situasi di Ukraina. Jika kondisi itu dibiarkan berlarut-larut maka akan memicu konflik global yang lebih besar. Pada kesempatan itu, hadir pula pengamat diplomasi dari Geneva Center for Security Policy, Paul Dziatkowiec yang menyampaikan beberapa rekomendasi bagi langkah Satgas IPU selanjutnya.	
4.	KSB BKSAP	Set. KSB mengikuti Rapat Interkem guna Persiapan Pelaksanaan FKB – SKB Indonesia – Peru	Dalam rapat tersebut, Set. KSB BKSAP menyampaikan <i>update</i> terbaru Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia – Peru serta <i>update</i> terkait MoU antara DPR RI dan Parlemen Peru.	Tgl. 13 Mei 2022
5.	BKSAP	RAPIM KE – 30 BKSAP DPR RI	Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-30 yang berlangsung secara virtual pada Sabtu, 14 Mei 2022. Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan BKSAP yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, S.H.,LL.M (F-PDIP); Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-PD); dan	Tgl. 14 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS). Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa Persidangan V, khususnya terkait persiapan 8th G-20 Parliamentary Speaker's Summit (P-20) dan Sidang Umum ke-44 AIPA, serta membahas tentang kesiapan Keketuaan DPR RI di AIPA tahun 2022-2023 mendatang. Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan BKSAP Day dan Panja Kerja sama Indo Pasifik. Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat, perkembangan kunjungan diplomasi dan kunjungan diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.	
6.	KSI - BKSAP	Ketua BKSAP DPR RI menghadiri <i>Meeting of the Executive Body of the League of Parliamentarians for Al-Quds di Istanbul, Turki</i>	Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) sebagai <i>Vice President of the League of Parliamentarians for Al-Quds</i> diundang ke <i>meeting of the executive body of the League</i> dengan Agenda: 1. <i>The Holy Qur'an.</i> 2. <i>Hamid Al-Ahmar's speech.</i> 3. <i>Discussion of the agenda.</i> 4. <i>Conference report.</i> 5. <i>Report of the visit to the State of Kuwait.</i> 6. <i>Report of participation in the Inter-Parliamentary Union.</i>	Tgl. 14 – 18 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7. <i>Membership in parliamentary organizations.</i> 8. <i>Workshop on the political symposium.</i> 9. <i>Visits (Qatar - Nigeria - Inter-Parliamentary Union to the Turkish Parliament).</i> 10. <i>Achievements report.</i> 11. <i>Other matters.</i>	
7.	BKSAP	Rapat Koordinasi & Halal bihalal Anggota BKSAP DPR RI	Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin rapat koordinasi BKSAP pada tanggal 12 Januari 2022 yang dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota BKSAP, secara fisik. Dalam rapat koordinasi disampaikan beragam rencana kegiatan BKSAP di masa persidangan V, antara lain: 1. Perpanjangan masa tugas Panja SDGs dan Indo-Pasifik. 2. Pengiriman delegasi ke sidang - sidang internasional/regional secara virtual / fisik dengan protokol kesehatan yang ketat. 3. Pelaksanaan BKSAP SDGs Day ke berbagai daerah / universitas. 4. Evaluasi Hasil Penyelenggaraan Sidang IPU ke-144 di Bali tanggal 20 - 24 Maret 2022. 5. Informasi Penyelenggaraan Sidang P-20 pada bulan September 2022. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula <i>update</i> terkini Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan Kunjungan Perorangan. Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa agar	Tgl. 17 – 19 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			para anggota BKSAP dapat meningkatkan komunikasi antar anggota GKSBB dan <i>counterpart</i> -nya di negara mitra. Terkait Kunjungan Perorangan, Pimpinan BKSAP berharap agar para anggota DPR RI dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut di tahun 2022.	
8.	KSI - BKSAP	Anggota BKSAP DPR RI, Dyah Roro Esti WP (F-PG) menghadiri Webinar IPU yang bekerja sama dengan <i>Committee on United Nations Convention on the Elimination of Discrimination against Women</i> (CEDAW)	Anggota BKSAP DPR RI, Hon. Dyah Roro Esti menghadiri webinar series yang diselenggarakan oleh <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) bekerja sama dengan <i>the Committee on United Nations Convention on the Elimination of Discrimination against Women</i> (CEDAW) pada Kamis malam, 19 Mei 2022. CEDAW adalah instrumen hukum internasional paling komprehensif yang menangani hak-hak perempuan yang juga menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan kesetaraan gender, dimana implementasi CEDAW dipantau oleh Komite CEDAW yang secara periodik melakukan review terhadap laporan implementasi CEDAW dari setiap negara kemudian memberikan rekomendasi. Semua negara yang telah mengadopsi Konvensi CEDAW wajib menyampaikan laporan implementasi ini setiap empat tahun sekali. Indonesia merupakan negara yang akan menyampaikan laporan implementasi CEDAW pada Sesi CEDAW ke-82 pada Juni 2022 mendatang.	Tgl. 19 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Adapun dalam kesempatan ini, Dyah Roro Esti menyampaikan tentang perkembangan perjuangan legislasi di parlemen Indonesia terkait dengan kesetaraan gender, termasuk yang paling baru adalah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Anggota BKSAP dari fraksi partai Golkar ini juga menjelaskan tentang keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Namun diakuinya bahwa keterlibatan parlemen dalam proses pelaporan CEDAW memang masih terbatas, karena pelaporan CEDAW menjadi kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan peran parlemen lebih menitikberatkan pada aspek legislasi dan pengawasan di tingkat implementasi. Lebih lanjut Anggota Komisi VII DPR ini juga mengajukan pertanyaan untuk diskusi kepada para anggota Parlemen Perempuan yang hadir dalam webinar, yakni mengenai “Bagaimana Anggota Parlemen dari negara-negara lain dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik di lapangan, khususnya terkait bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)?” Diskusi akan dilanjutkan dalam webinar CEDAW berikutnya, mengingat webinar series ini	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			direncanakan akan diselenggarakan 3 kali antara bulan Mei-Desember 2022.	
9.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) mengadakan pertemuan dengan Dubes Uni Eropa, H.E. Mr. Vincent Piket	Wakil Ketua BKSAP dan Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa, Ir. H. A. Hafisz Thohir (F-PAN), menerima Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Piket di Gedung Nusantara III lantai 2 (20/05/2022). Wakil Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik atas dibentuknya Indonesia-European Parliamentary Friendship Group (IEPFG) periode 2021-2024 yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kedua belah pihak, yang didasari oleh kesamaan semangat keberagaman, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam membahas keketuaan DPR RI di Parliament 20 (P20), Dubes siap memfasilitasi dan mendukung kehadiran anggota parlemen dari negara anggota Uni Eropa untuk datang ke persidangan P20. Dubes mengapresiasi rencana pencabutan larangan ekspor sawit, yang dapat mempermudah akses minyak dan menstabilkan harga pangan di dalam dan luar negeri. Wakil Ketua BKSAP lalu menambahkan bahwa industri sawit Indonesia sudah semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga siap bersaing di pasar global.	Tgl. 20 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Terkait konflik Ukraina-Rusia, Kedua pihak sepakat bahwa pendekatan secara negosiasi, diplomasi, dan dialog merupakan jalur terbaik untuk mencapai solusi konflik tersebut. Indonesia - Uni Eropa juga akan terus bekerja sama dalam pemulihan pasca pandemi dan pemulihan dari dampak negatif konflik Ukraina - Rusia yang mengacaukan ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi, dan rantai pasok global.	
10.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Palestina ke Amman, Jordania	GKSB DPR RI – Parlemen Palestina mengadakan Kunjungan ke Amman, Jordania. Delegasi dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Palestina, Dr. Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) dan beranggotakan Darul Siska (F-PG), La Tinro La Tunrung (F-PGerindra) dan Subardi (F-PNasdem). Delegasi juga didampingi oleh NGO yang aktif berjuang untuk Kemerdekaan Palestina. Delegasi mengadakan pertemuan dengan: 1. PNC (Palestine National Council) 2. Kunjungan ke Kamp Al- Wehdat (Pusat pengungsi dari Palestina) 3. Konsul Kehormatan Palestina di Jordania 4. Dubes RI dan jajaran di KBRI Amman 5. Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Yordania Sejumlah isu terkini Palestina dibahas dalam pertemuan dengan Parlemen Palestina. Ketua	Tgl. 22 – 28 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			GKSB DPR RI Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) secara tegas menyampaikan posisi DPR RI terkait isu Palestina antara lain tidak akan pernah mengakui eksistensi negara Israel. DPR juga terus menyuarakan dukungan politik bagi Palestina di semua forum parlemen. Soal lain, DPR terus mendesak adanya persatuan bangsa Palestina, hingga terkait manajemen distribusi donasi untuk rakyat Palestina yang kredibel dan akuntabel. Sementara itu, Ketua PNC Rahwi Fattouh menyampaikan urgensi Al Quds Al Sharif (Yerusalem) sebagai isu sentral Palestina. Ia juga menyambut baik tawaran Delegasi GKSB DPR untuk mengundang faksi-faksi pejuang Palestina untuk berdialog di Jakarta dalam kerangka rekonsiliasi di bawah sponsor Mesir. DPR RI secara terbuka terus mendorong semua pihak-pihak yang belum mau bersatu untuk mulai membicarakan perdamaian, dimana Parlemen Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator.	
11.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Arab Saudi	GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi mengadakan rapat internal untuk membahas rencana program kerja GKSB DPR RI-Parlemen Arab Saudi	Tgl. 23 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			(23/05/22). Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh Idris Laena (F-PG) selaku ketua GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi, Dr. Jefry Romdonny (F-PGerindra) , Johan Rosihan (F-PKS) serta Debby Kurniawan (F-PD) selaku anggota GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi. Dalam rapat tersebut, Ketua GKSB memberi usulan agar GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi untuk fokus pada isu kuota haji dan ekspor hewan qurban. Ketua rapat juga mengarahkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi dapat memulai komunikasi dan koordinasi dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia dan Kemlu RI/KBRI Riyadh terkait <i>pending matters</i> dan guna mendapatkan masukan yang lebih detail terkait isu terkini hubungan bilateral kedua negara. Dalam waktu dekat, akan diagendakan <i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk membahas hubungan bilateral kedua negara dan rencana kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Arab Saudi.	
12.	KSI - BKSAP	Ketua BKSAP DPR RI menghadiri GOPAC <i>Executive Committee Meeting</i> , di Doha, Qatar	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dengan Kepala Biro KSAP, Endah T.D. Retnoasuti, menghadiri <i>GOPAC Executive Committee Meeting</i> di Doha, Qatar sebagai tindak lanjut dari <i>IPU-GOPAC Joint Panel Discussion on International Cooperation to</i>	Tgl. 25-26 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>Prosecute Corruption and Recover Stolen Assets</i>, dalam rangkaian acara IPU KE-144 di Nusa Dua, Bali, 22 Maret 2022 lalu. Mewakili <i>chapter</i> kawasan Asia Tenggara sebagai Presiden SEAPAC pada pertemuan tersebut, Dr. Fadli Zon menyampaikan rencana strategis tahunan yang meliputi 3 fokus: i) <i>Knowledge research and advocacy</i>, ii) <i>Engagement and empowerment</i>, dan iii) <i>Institutional improvements</i>. Ia juga mendorong kemitraan yang lebih kuat antara GOPAC dengan negara anggota, mitra internasional, dan lembaga pembangunan untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen dalam bidang anti-korupsi. Ketua BKSAP juga melakukan <i>Embassy Visit</i> untuk berdiskusi dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Qatar, bersama Prof. Din Syamsuddin, serta didampingi oleh Duta Besar Amb. Ridwan Hassan. Di sela-sela rangkaian kegiatan, dilakukan juga kunjungan ke kantor pusat Al Jazeera untuk menyampaikan dukungan dan bela sungkawa atas gugurnya jurnalis Shireen Abu Aqleh yang ditembak oleh tentara Israel di Jenin, West Bank pada 11 Mei 2022. Selain itu, delegasi juga melakukan pertemuan dengan <i>Qatar Philatelic & Numismatic Community</i>.	
13.	KSR - BKSAP	<i>The 1st Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Specialized Committee on</i>	Pimpinan BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Dr. Mardani, M.Eng (F-PKS), Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), dan Putu Supadma Rudana, MBA (F-PDemokrat) menghadiri <i>The 1st</i>	Tgl. 26 – 27 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<i>Political Affairs and Foreign Relations dan The 1st Meeting of the PUIC Committee on Muslim Minorities di Ankara - Turki</i>	<i>Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations dan The 1st Meeting of the PUIC Committee on Muslim Minorities di Ankara - Turki tanggal 26-27 Mei 2022.</i> <i>The 1st Extraordinary Meeting of the PUIC Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations beragendakan pemilihan Rapporteur of the Committee, pembahasan dan persetujuan Rules of Procedure of the Committee on Muslim Minorities dan pemilihan anggota Committee on Muslim Minorities di antara anggota Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations berdasarkan pemerataan geografis (dua anggota dari masing-masing grup geografis Arab, Asia dan Afrika) serta adopsi laporan sidang.</i> <i>Sedangkan The 1st Meeting of the PUIC Committee on Muslim Minorities beragendakan pemilihan Rapporteur of the Committee, pembahasan isu-isu berkenaan dengan pelanggaran HAM muslim minoritas di negara-negara non-anggota PUIC, serta adopsi laporan sidang.</i> <i>Dr. Mardani Ali Sera selaku Ketua Delegasi menyampaikan intervensinya dalam The 1st Extraordinary Meeting of the PUIC Standing</i>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations</i> yang menggarisbawahi masih banyaknya muslim yang menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran HAM di negara-negara non-anggota PUIC meskipun jumlah populasi muslim di dunia secara statistik meningkat signifikan. Dr. Mardani Ali Sera menyerukan seluruh anggota parlemen yang hadir untuk mengambil tindakan yang tepat secara moral maupun politis menyikapi situasi kemanusiaan tersebut. Ia juga menyoroti Diplomasi Parlemen sebagai platform parlemen-parlemen anggota PUIC untuk membangun jembatan dialog politis dengan parlemen di negara-negara yang dihuni oleh masyarakat muslim minoritas dengan tujuan menghentikan kekerasan, mendorong rasa saling memahami dan menghargai, serta terbentuknya legislasi yang lebih baik dan kebijakan yang memungkinkan terciptanya perdamaian berkelanjutan. Terkait <i>Rules and Procedures</i>, delegasi Indonesia mengusulkan sedikit amandemen terkait redaksional dan mendukung usulan pemilihan anggota <i>Standing Specialized Committee on Political Affairs and Foreign Relations</i> berdasarkan pemerataan geografis.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pada <i>The 1st Meeting of the PUIC Committee on Muslim Minorities</i> delegasi Indonesia menyerukan peserta sidang untuk menaruh perhatian pada Muslim Rohingnya yang masih berada dalam situasi mengkhawatirkan, terutama dengan adanya Kudeta oleh Junta Militer pada 1 Februari 2021. Dalam sidang tersebut, Indonesia meminta dukungan parlemen anggota PUIC untuk upaya kemanusiaan terkait kondisi masyarakat muslim Rohingnya sebagaimana telah disuarakan parlemen Indonesia secara konsisten selama ini dan berharap nasib Muslim Rohingnya dapat menjadi fokus kerja Komite di masa depan.	
14.	KSI BKSAP	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengikuti rapat satgas IPU ke-III untuk Konflik Rusia - Ukraina	Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon kembali mengikuti rapat Satgas IPU Ke-III untuk Konflik Rusia-Ukraina secara daring pada Jumat, 27 Mei 2022. Pada rapat kali ini, Parlemen Ukraina telah mengirim surat ke pihak IPU dan menyetujui pembentukan <i>Task Force</i> dengan syarat: 1. <i>Replace all references to the "conflict" with the term "Russian aggression against Ukraine", as it is qualified in the UN GA Resolution ES-11/1, IPU emergency item resolution and PACE Opinion 300.</i> 2. <i>Delete the notion of dialogue between Ukrainian and Russian parliamentarians. Russian MPs</i>	Tgl. 27 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>are among those directly responsible for unleashing this war. The Russian Parliament overwhelmingly urged the Russian President Vladimir Putin to commit a violation of international law by recognizing, in violation of international law, the independence of the so-called Luhansk and Donetsk People's Republics constituting an integral part of Ukraine and later directly allowing the use of the Russian army against Ukraine. In view of the above, any direct dialogue is impossible, dangerous and counter-productive.</i> <i>3. A representative of the Russia Federation cannot be a Member of the IPU Task Force.</i> <i>4. Add the following objectives of the Task Force:</i> <i>4.1. obtain first-hand information on the consequences of the Russian aggression in Ukraine, including violations of human rights;</i> <i>4.2. document and provide impartial account of the crimes committed against Ukrainians;</i> <i>4.3. work with Russian MPs to persuade them to voice their opposition to the Russian aggression and to comply with clear-cut rules of international law.</i> <i>5. Delete the notion of humanitarian assistance to Russians since it completely distorts the reality. Ukrainians are suffering from the genocide and aggression of the 21st century, while Russia is an aggressor and surely does not need any humanitarian assistance.</i>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Agenda utama pertemuan tersebut mendiskusikan respon dari pihak Rusia dan Ukraina mengenai keterlibatan IPU Task Force untuk mendorong dialog demi mengakhiri perang. Secara umum, kedua belah pihak menyambut baik kehadiran IPU Task Force untuk berkunjung, baik ke Rusia maupun Ukraina serta melihat langsung dampak perang yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Sebagai anggota Task Force, Dr. Fadli Zon kembali menekankan netralitas yang harus menjadi prinsip dasar berbagai agenda IPU Task Force ke depan. Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP DPR RI juga menentang tindakan-tindakan kontra-produktif yang mengganggu langkah IPU Task Force dalam mengakhiri perang melalui diplomasi parlemen. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 7 negara anggota Task Force IPU ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong serta didampingi oleh dua orang <i>expert</i> di bidang diplomasi dan keamanan.	
15.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Qatar	Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Qatar, Putra Nababan (F-PDIP), yang dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen	Tgl. 30 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Qatar, Hj. Saniatul Lativa (F-PG) dan Drs. H. Zainul Arifin (F-PGerindra). Dalam rapat tersebut, Ketua dan Anggota GKSB memberi usulan agar pertemuan pada rangkaian kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Qatar untuk berfokus pada kerja sama antar parlemen, regulasi makanan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, olahraga dan persiapan penyelenggaraan piala dunia di Qatar pada tahun 2022, baik dari sisi olahraga, kesehatan, dan pariwisata. Ketua rapat juga mengarahkan agar GKSB DPR RI - Parlemen Qatar mengagendakan rapat virtual dengan Dubes RI di Doha, Qatar untuk membahas rencana kunjungan, rangkaian pertemuan serta <i>pending matters</i> terkait isu terkini hubungan bilateral kedua negara.	
16.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Anggota BKSAP DPR RI, Bapak Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA, M.B.A dengan Tom Coghlan Sekretaris Satu (Bidang Politik) Kedutaan Besar Australia	Anggota Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) SDGs DPR RI, Dr. Sihar P. H. Sitorus mengadakan pertemuan bilateral dengan First Secretary (Politics) Kedutaan Besar Australia, Tom Coghlan pada Senin (30/5/2022). Pada pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu yang menjadi perhatian kedua negara mulai dari pemulihan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, pertanian, pendidikan, hingga isu-isu politik terkini termasuk isu penguatan demokrasi dan keamanan. Dr. Sihar Sitorus menegaskan komitmen Indonesia	Tgl. 30 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			untuk terus memperkuat kerja sama dengan Australia terutama di bidang ekonomi yang selama ini sudah terjalin seperti melalui Indonesia-Australia <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA) dan <i>Comprehensive Strategic Partnership</i> (CSP) serta berbagai kerja sama lainnya. Di samping itu, pertemuan tersebut juga membahas berbagai topik dan agenda yang berkaitan dengan keketuaan Pemerintah RI di G20 dan pelaksanaan Parliament 20 (P20) Summit bulan September mendatang.	
17.	KSB – BKSAP	Virtual meeting Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon dengan Mr. Urmas Paet, Ketua IEPFG (Indonesia – <i>Europe Parliamentary Friendship Group</i>)	Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menghadiri virtual meeting dengan Ketua Indonesia - EU <i>Parliamentary Friendship Group</i> (IEPFG) yang diadakan oleh KBRI Brussels pada hari Senin (30/05/2022). <i>Virtual meeting</i> tersebut dihadiri oleh Ketua IEPFG, Hon. Mr. Urmas Paet, Wakil Ketua IEPFG, Hon. Mr. Tomasz Poreba, dan Dubes RI untuk Belgia, Y.M. Andri Hadi. Agenda utama virtual meeting tersebut adalah untuk membahas hubungan bilateral Indonesia - EU serta komitmen kedua pihak dalam mengupayakan perdamaian, khususnya di kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Indonesia dan Uni Eropa memiliki kesamaan tujuan terhadap berbagai tantangan global, khususnya pemulihan ekonomi pasca pandemi, perubahan	Tgl 30 Mei 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			iklim, energi terbarukan, serta keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam pertemuan tersebut Ketua BKSAP juga menyampaikan keikutsertaan Indonesia pada IPU Task Force for Ukraine yang merupakan salah satu hasil penyelenggaraan sidang IPU ke-144 pada bulan Maret lalu. Partisipasi Indonesia dalam gugus tugas tersebut juga menyatakan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya mencapai perdamaian antara Rusia & Ukraina, melalui pendekatan non kekerasan, yaitu dialog dan negosiasi. Pihak Parlemen Uni Eropa menyambut baik kontribusi Indonesia dalam gugus tugas tersebut serta berharap agar langkah tersebut dapat membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan Uni Eropa. Disampaikan juga rencana kunjungan Wakil Ketua IEPFG, Hon. Mr. Tomasz Poreba ke Indonesia dan undangan kepada BKSAP dan GKSB DPR RI - Parlemen Uni Eropa untuk berkunjung ke Parlemen Uni Eropa.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Antisipatif APBN 2022 Untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN. Hasil keputusan Raker, antara lain: 1. Disrupsi <i>supply</i> dan konflik Rusia Ukraina menyebabkan kenaikan harga komoditas, ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi. Dampak terhadap perekonomian domestik mengakibatkan pergeseran asumsi ICP yang dipatok oleh APBN 2022 sebesar Rp. 63 US\$ per barel. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN 2022. Banggar DPR-RI menyetujui perubahan Postur ICP sebesar US\$ 100 per barel. 2. Perubahan harga ICP yang kita sepakati diatas berkonsekuensi terhadap postur pendapatan dan belanja negara serta defisit pada APBN 2022. Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur pendapatan dan belanja negara, dengan rincian; i. Pendapatan negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846,1 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp2.266,2 triliun. ii. Belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun	Raker dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp3.106,4 triliun. 3. Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik (<i>administered prices</i>), namun di sisi lain, suplai kebutuhan komoditas energi domestik perlu dijaga termasuk kesehatan keuangan badan usaha (Pertamina dan PLN). Oleh sebab itu Banggar DPR menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun, dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp. 275,0 triliun, terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp. 234,0 triliun serta kompensasi listrik sebesar Rp. 41,0 triliun 4. Meningkatnya harga berbagai barang konsumsi, dan tren kenaikan inflasi secara global perlu diantisipasi dengan memaksimalkan fungsi APBN sebagai <i>social stabilizer</i>. Untuk itu, Banggar DPR menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlintsos sebesar Rp. 18,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. 5. Membaiknya kinerja ekspor dan meningkat berbagai harga komoditas global berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan negara, terutama pendapatan dari sumber daya alam. Peningkatan ini berkonsekuensi terhadap peningkatan alokasi transfer ke daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). Banggar DPR menyetujui tambahan DBH sebesar Rp. 35,2 triliun. Peningkatan DBH tersebut telah	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mempertimbangkan <i>burden sharing</i> antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG. 6. Banggar DPR menyetujui agar Pagu belanja K/L tetap sebesar Rp. 945,8 triliun, percepatan penarikan pinjaman, dan realokasi/pergeseran belanja antara lain menyetujui efisiensi DAK Fisik sebesar Rp.12,0 triliun, yaitu dari Rp.60,9 triliun menjadi Rp.48,9 triliun. 7. Meningkatnya belanja negara mengikat secara konstitusional terhadap penambahan anggaran pendidikan. Banggar DPR menyetujui penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp. 78,5 triliun, sehingga anggaran pendidikan menjadi Rp. 621,3 triliun untuk memenuhi <i>mandatory</i> alokasi 20 persen anggaran pendidikan terhadap belanja negara. Peningkatan anggaran pendidikan ini terdiri dari tambahan anggaran pendidikan pada belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 30,6 triliun dan tambahan pembiayaan pendidikan sebesar Rp. 47,9 triliun. 8. Perubahan pendapatan dan belanja negara berdampak langsung terhadap defisit APBN 2022, baik dari sisi nominal maupun prosentase. Banggar DPR menyetujui defisit APBN tahun 2022 , yaitu dari sebesar Rp868,0 triliun dalam APBN tahun 2022 atau (4,85 persen terhadap PDB) menjadi Rp840,2 triliun atau (4,50 persen terhadap PDB). Penurunan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			defisit anggaran tersebut telah memperhitungkan biaya utang yang meningkat tajam akibat potensi inflasi dan kenaikan suku bunga. Pembiayaan utang telah mempertimbangkan penurunan target SBN dan pemanfaatan tambahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp. 50,0 triliun.	
2.	Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Kabupaten Bandung	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Audiensi mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022-2023. Resume rapat, antara lain: 1. Pemerintah Pusat perlu memperhatikan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan oleh Desa. Hal ini karena selama ini program yang sudah ditetapkan pada Musrenbang kabupaten tetapi kemudian diintervensi oleh pemerintah pusat sehingga program yang sudah ditetapkan dalam Musrenbang tidak dapat dilaksanakan. 2. Pemerintah Pusat agar bisa menetapkan anggran Dana Desa dengan lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk dana operasional desa. 3. Dana Desa tahun 2023 agar difokuskan ke program ketahanan pangan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian. 4. Pemerintah Pusat agar mengembalikan kewenangan penggunaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa karena yang mengetahui permasalahan di desa adalah Pemerintahan Desa. Selain itu, Pemerintah perlu menyederhanakan aturan teknis penggunaan	Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 30 Mei 2022, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR-RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dana desa agar memudahkan Pemerintahan Desa 5. Pemerintah Pusat agar mengalokasikan BLT Desa menjadi maksima 40% dan sebaiknya diarahkan untuk program pembangunan 6. Pemerintah agar menerapkan aturan 3% alokasi dana desa untuk membiayai operasional desa serta perlu mengalokasikan dana pendamping bagi alokasi penggunaan Dana Desa 7. Pemerintah agar memberikan izin kepada Desa untuk melakukan revisi dan <i>refocussing</i> dana yang tidak terpakai untuk penanggulangan pandemi Covid-19 untuk pendanaan pembangunan desa. 8. Desa diberikan payung hukum dalam mengelola hutan yang berasal dari alih kelola dari swasta ke desa terutama terkait pengelolaan untuk pariwisata. Selain itu, diperlukan juga program yang efektif untuk menanggulangi kerusakann hutan utamanya di Kabupaten Bandung. 9. Banggar DPR RI agar mendorong Pemerintah Pusat utamanya Kemenkeu, Kemendes PDT dan Kemendagri agar menyelaraskan aturan mengenai penggunaan Dana Desa dan mengurangi tumpang tindih aturan penggunaan dana desa di ketiga kementerian tersebut.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat Intern, Selasa, 17 Mei 2022 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS V TS 2021-2022	-----	
2.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Selasa, 17 Mei 2022 Agenda: Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Gorden RJA Kalibata	BURT memutuskan Setjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan gorden, <i>vitrase</i> , dan <i>blind</i> RJA Kalibata.	
3.	Kunjungan Kerja Luar Negeri: 1. Parlemen Turki, 18 s.d. 24 Mei 2022. 2. Parlemen Uni Emirat Arab, 25 s.d. 31 Mei 2022	Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR RI untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait dengan: 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktekkan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan konstituennya. 3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 4. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen. 5. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen. 6. Manajemen sistem pendukung (<i>supporting system</i>) parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	• Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); • Parlemen Swedia; • Swedish National Financial Management Authority (ESV); • Swedish National Audit Office (NAO).	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Negara Swedia, selanjutnya melakukan Pertemuan dengan KBRI di Stockholm, Pertemuan dengan Parlemen Swedia di Riksdagen Pertemuan dengan Parlemen Swedia (Riksdagen), Pertemuan dengan Swedish National Financial Management Authority (ESV) di Drottningatan 89 Stockholm, dan Pertemuan dengan Swedish National Audit Office (NAO) di Eriksgatan 117, Stockholm.	Kunjungan dilaksanakan pada, tanggal 16 s.d 22 Mei 2022
2.	• Komunitas Kretek; • Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI); • Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO); • Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI); • Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komunitas Kretek, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam rangka mendapatkan masukan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau.	RDPU dilaksanakan, tanggal 30 Mei 2022
